



BADAN POM RI

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2018



SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan *full spectrum* yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, beberapa kasus penting terkait pengawasan Obat dan Makanan telah ditemukan dan berhasil diungkap oleh BPOM dan menjadi perhatian besar di masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, maka pengawasan Obat dan Makanan perlu diperkuat. Untuk itu, beberapa langkah strategis dilakukan BPOM dalam rangka transformasi menuju “BPOM baru”.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2018. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, Mei 2018

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

daftar isi

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	5
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan ..	5
II. Hasil Investigasi Awal dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	10
III. Standardisasi.....	11
IV. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	12
V. Pengembangan Aplikasi e-BPOM	17
VI. Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan ..	18
VII. Layanan Bantuan Hukum (<i>Legal Management</i>).....	19
VIII. Kerjasama Internasional.....	20
IX. Pengelolaan Anggaran.....	21
X. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	22
PENUTUP.....	22
LAMPIRAN	23

daftar gambar

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2018	5
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan I Tahun 2018.....	5
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2018	6
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2018	6
Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2018	7
Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2018	7
Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2018....	8
Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2018 ..	8
Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping	9
Gambar 10. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan POM Pusat dan Balai s.d. Triwulan I Tahun 2018	21
Gambar 11. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja s.d Triwulan I Tahun 2018.....	21



BADAN POM RI

HIGHLIGHT

s.d TRIWULAN I TAHUN 2018



Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik, Cambuk Motivasi Peningkatan Pelayanan Publik BPOM

Jakarta / Rabu (24/01/2018)

Balai Besar POM (BBPOM) di Samarinda, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Palembang, Balai POM di Bengkulu, dan Balai POM di Serang mendapatkan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terbaik kategori Pemerintah Pusat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PAN dan RB, Asman Abnur pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2017 di kantor Kemenpan RB.

Temuan Produk Obat Dan Suplemen Mengandung DNA Babi, Bukti Kerja Nyata BPOM RI



Jakarta / Senin (05/02/2018)

BPOM mengadakan konferensi pers terkait perkembangan temuan produk Viostin DS dan Enzyplex yang mengandung DNA babi bersama dengan YLKI dan LPPOM MUI. BPOM telah memerintahkan kepada PT. Pharos Indonesia dan PT. Medifarma Laboratories untuk menarik kedua produk tersebut dari peredaran serta menghentikan proses produksi. BPOM juga telah melakukan pencabutan nomor izin edar kedua produk tersebut.

Perombakan Pejabat Struktural Eselon I BPOM RI Sebagai Langkah Perkuatan Pengawasan Obat Dan Makanan



Jakarta / Jum'at (09/02/2018)

Kepala BPOM Penny K. Lukito melantik 6 (enam) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPOM di aula Gedung C BPOM. Pelantikan ini merupakan tahapan pertama dari restrukturisasi organisasi yang sedang dilakukan BPOM sebagai salah satu tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BPOM Gerebek Pabrik Kosmetika Ilegal di Jelambar



Jakarta / Rabu (12/02/2018)

BBPOM di Jakarta melakukan penggerebekan produsen kosmetik ilegal di Jelambar, Jakarta Barat dengan nilai keekonomian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari hasil operasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa alat produksi, bahan baku, produk ruahan dan produk jadi. BBPOM di Jakarta akan menindaklanjuti temuan ini sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelantikan Pejabat Struktural, Langkah Awal Perubahan BPOM



Jakarta / Kamis (15/02/2018)

Kepala BPOM, Penny K. Lukito melantik 306 orang pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) menjadi Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di aula Gedung C BPOM. Pelantikan ini merupakan tahapan lebih lanjut dari restrukturisasi organisasi yang sedang dilakukan BPOM.

Rayakan HUT di CFD, BPOM Ajak Masyarakat Perangi Obat dan Pangan Ilegal



Jakarta / Minggu (25/02/2018)

BPOM mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk masyarakat pengunjung Car Free Day (CFD) di area sekitaran Bundaran HI. Kegiatan KIE CFD ini merupakan tindak lanjut dari Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) dengan tema "Cinta Indonesia, Tolak dan Laporkan Obat dan Pangan Ilegal. Ingat Cek KLIK!"

BPOM RI Sita 5 Miliar Rupiah Kosmetik Ilegal Mengandung Hidrokinon



Serang / Selasa (27/03/2018)

BPOM bersama dengan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Merak, Kepolisian Sektor Pulo Merak, Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, dan Stasiun Karantina Perikanan berhasil menggagalkan peredaran kosmetik ilegal merek RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface sebanyak 1.055 karton (@ 128 pieces) senilai 5,4 miliar rupiah di Serang. Kosmetik ilegal ini mengandung bahan berbahaya hidrokinon yang dapat mengakibatkan hiperpigmentasi, mengiritasi kulit bahkan merusak ginjal.



BADAN POM RI

**HASIL KEGIATAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN
s.d TRIWULAN I TAHUN 2018**

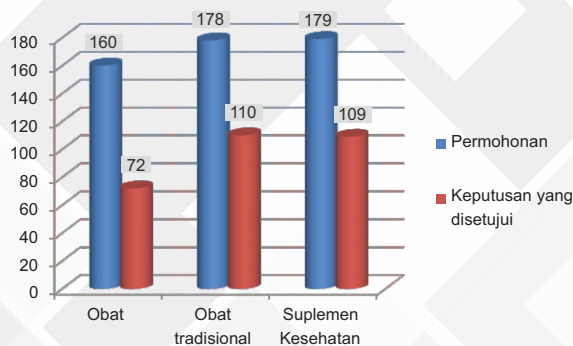


Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan

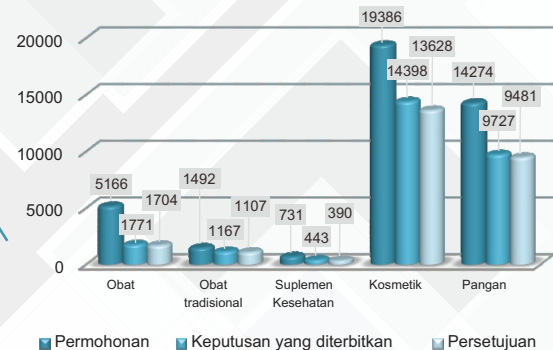
Pengawasan *pre-market*

Sebelum obat diizinkan untuk diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus diregistrasi di BPOM untuk dievaluasi terlebih dahulu terhadap keamanan, khasiat dan mutu serta penandaannya/label.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2018, telah diterbitkan **27506** keputusan dan **26310** persetujuan izin edar dari **41049** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan s.d. Triwulan I Tahun 2018



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2018

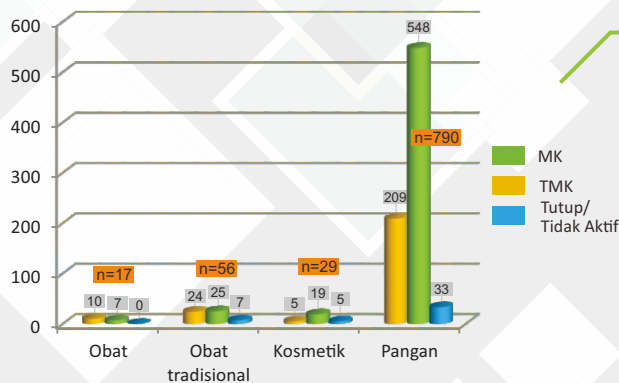
Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan I tahun 2018, dari 517 rancangan iklan, telah disetujui 291 iklan.**

Pengawasan *post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa produk Obat dan Makanan yang beredar terjamin keamanan, khasiat dan mutunya sesuai informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui sampling dan pengujian laboratorium BPOM di seluruh Indonesia yang sudah terakreditasi. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan sarana produksi dan distribusi untuk memastikan bahwa produk yang di produksi dan didistribusikan benar terjaga keamanan, khasiat serta mutunya.

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

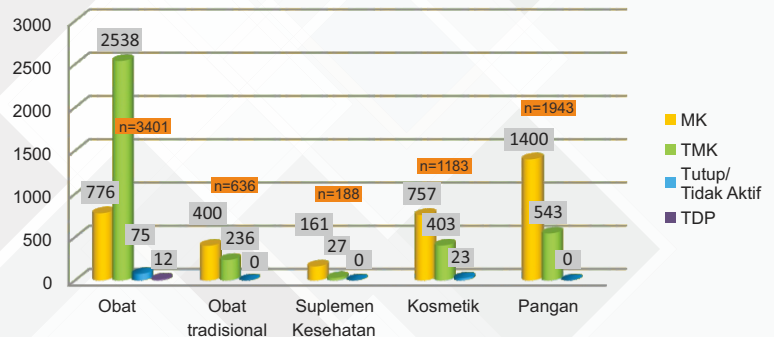
BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Pembuatan Obat dan Makanan Yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2018

Dalam rangka penerapan Cara Pembuatan Obat dan Makanan Yang Baik pada sarana produksi, sampai dengan Triwulan I tahun 2018 telah diperiksa 1682 sarana dengan 1147 sarana adalah TMK.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2018 telah diperiksa 7351 sarana distribusi obat dan makanan dengan 3747 sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2018

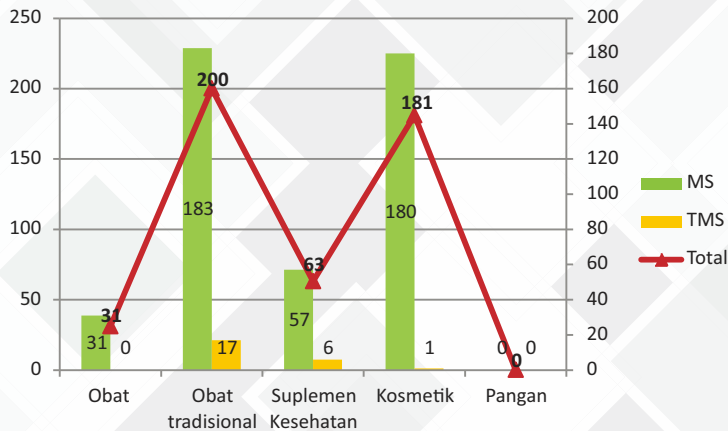
Ket:

MK = Memenuhi Ketentuan

TDP = Tidak dapat diperiksa

TMK = Tidak Memenuhi Ketentuan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

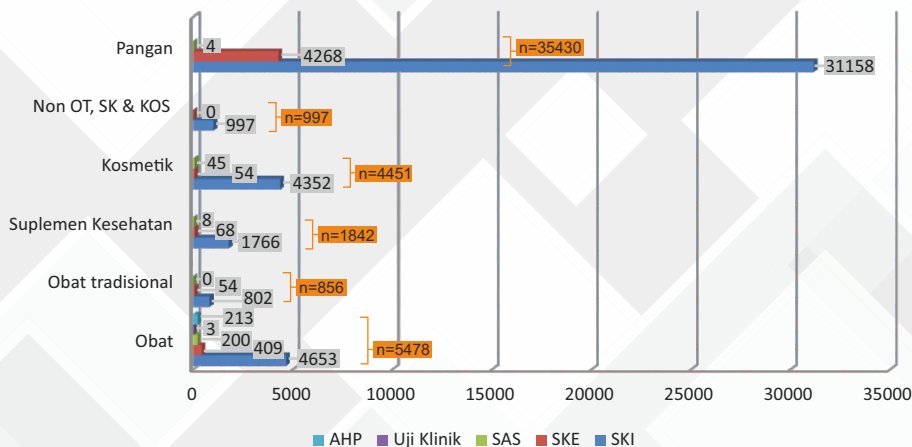


Sampai dengan **Triwulan I tahun 2018** telah dilakukan pengujian Obat dan Makanan terhadap **475 sampel**, dimana **451 (94,95%) sampel MS**.

Ket:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2018

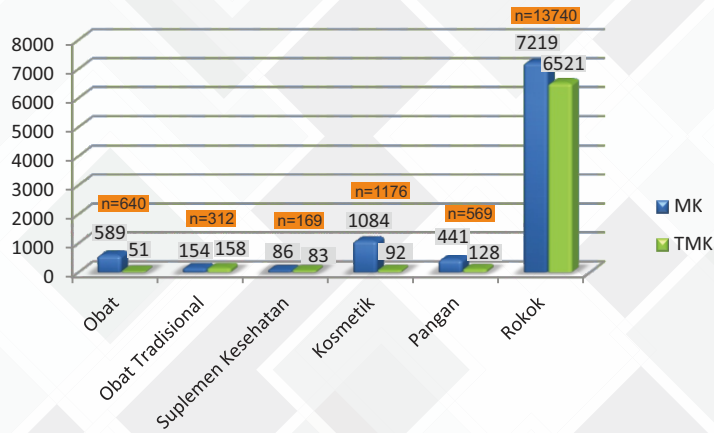
Sertifikasi



Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2018

Dalam rangka mendorong ekspordan upaya pengawasan Produk dan BB yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*) dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan I tahun 2018** telah diterbitkan **43728 SKI**, **4853 SKE**, **257 SAS**, **3 Uji Klinik**, dan **213 AHP** Obat dan Makanan.

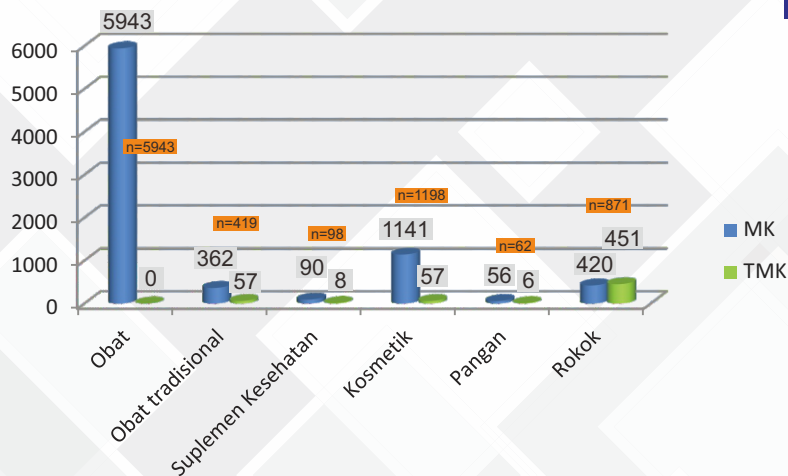
Pengawasan Iklan



Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2018

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang keliru tentang produk obat dan makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan I tahun 2018, dari 16606 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 9573 iklan memenuhi ketentuan.

Pengawasan Label



Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2018

BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk obat dan makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM agar tidak memberikan informasi salah dan menyesatkan pada masyarakat. Sampai dengan Triwulan I tahun 2018, dari 8591 penandaan Obat dan Makanan yang diawasi, 8012 (93,26%) penandaan memenuhi ketentuan.

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Obat Tradisional (MESOT), Suplemen Kesehatan (MESSK), dan Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sangat luas oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia :

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

	Jumlah Laporan
Obat	57.197
Obat Tradisional	7
Suplemen Kesehatan	12
Kosmetik	97

Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping



Hasil Investigasi Awal dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat

Pada tanggal 13 Maret 2018 telah dilaksanakan kembali Forum Koordinasi Lintas Sektor antara BPOM Bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk membahas program dan kegiatan Aksi Nasional terkait Strategi Respon yang sudah dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.



Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

BPOM melakukan penindakan terhadap peredaran sediaan farmasi berupa kosmetika ilegal (merk Barbapapa, Animate Vitamin E, Egg White, Cherveen) di Jl. Kayu Besar No. 1 RT. 01 RW. 08 Kel. Tegal Alur, Cengkareng sebanyak 900 koli dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.

BPOM telah menyita seluruh produk kosmetika ilegal tersebut dan sedang melakukan proses investigasi kepada pemilik/penanggung jawab produk. BPOM juga akan melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui apakah terdapat kandungan bahan dilarang atau berbahaya dalam produk kosmetika tersebut.

Terhadap temuan ini, PPNS BPOM akan menindaklanjuti dengan proses pro-justitia guna mengungkap aktor intelektualnya. Pelaku diduga melanggar Pasal 196 dan/ atau Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu mendistribusikan produk sediaan farmasi jenis kosmetika Tanpa Izin Edar dan/ atau mengandung bahan yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal

Sampai dengan Triwulan I tahun 2018, BPOM telah melaksanakan pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di BBPOM di Palembang dengan total nilai Rp23.630.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Operasi Opon VII tahun 2018.



Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.



Obat

Telah disusun 10 standar obat, dimana 1 standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu Draf Perka Obat – Obat Tertentu (55,56%)



Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun 7 standar dan kajian dari 40 standar dan kajian OT, kosmetik dan suplemen kesehatan, yaitu :

- Kajian Coscinium fenestratum dan Evolvulus alsinoides (100%).
- Kajian bahan baku sisik dan kulit ikan Toman (*Channa micropeltes*) sebagai kategori produk obat tradisional (100%).
- Kajian kategori produk dengan bahan baku Bawang Hitam (100%).
- Kajian tentang Lemongrass Oil (*Cymbopogon Flexuosus* dan *Cymbopogon Citratus*) sebagai Bahan Antiseptik Dalam Sabun Mandi (100%).
- Kajian tentang Timiron Liquid Silver (100%).
- Kajian di bidang suplemen kesehatan N-acetylsystein (100%).
- Kajian di bidang suplemen kesehatan Kalsium Laktat (kadar air) (100%).



Pangan

Telah disusun 18 standar pangan, dimana 4 standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu :

- Rancangan Peraturan BPOM tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan (97%)
- Rancangan Peraturan BPOM tentang pangan untuk kebutuhan gizi khusus-PDK (70%)
- Rancangan revisi Peraturan Kepala BPOM tentang kategori pangan 01.0 produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori pangan 02.0 (70%)
- Rancangan revisi Peraturan Kepala BPOM tentang informasi nilai gizi (50%)



Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

BPOM melakukan fungsi pengawasan tiga lapis, yaitu produsen, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu pilar dalam pengawasan obat dan makanan, masyarakat harus terus diedukasi dan diberi informasi yang benar tentang keamanan obat dan makanan agar dapat melindungi dirinya sendiri dari risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu.

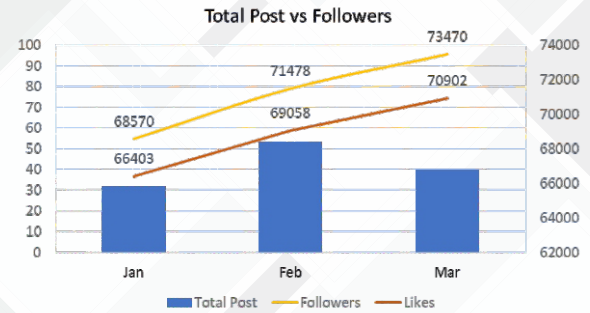
BPOM melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi termasuk dengan memanfaatkan pers/media. BPOM telah menerbitkan 10 Siaran Pers dan 10 penjelasan/klarifikasi berita terkait hoax yang dipublikasikan juga melalui website dan media sosial BPOM. Selain itu dilaksanakan juga 12 kali talkshow atas permintaan media televisi, 27 kali wawancara Pimpinan BPOM dengan media.



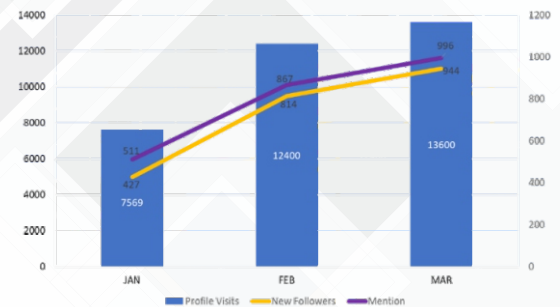
Konferensi pers Temuan 5 Miliar Kosmetik Ilegal, 27 Februari 2018

BPOM juga menayangkan 6 advertorial di Media Online dan Media Cetak. Serta melakukan penyebaran informasi melalui media sosial melalui *akun official Facebook Fanpage, Twitter, Instagram dan YouTube*. Hasilnya performa media sosial BPOM mampu menggerakkan jumlah *followers* secara positif.

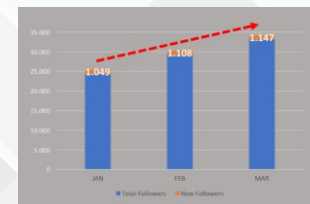
1 **Facebook Fanpage official** s.d Triwulan I tahun 2018 telah mencapai **73.470 followers** dan **7.090 likes**. *Performance Fanpage Posts Engagement* tertinggi pada bulan januari adalah Penjelasan BPOM tentang materi Kopi Luwak, disusul MSG, Minyak Jelantah, lalu informasi tentang Obat Generik. Pada bulan Februari tentang Albothyl. Pada bulan Maret, Pemberitaan tentang Cacing pada Makanan Ikan Kaleng dan kegagalan pengiriman produk kosmetik illegal.



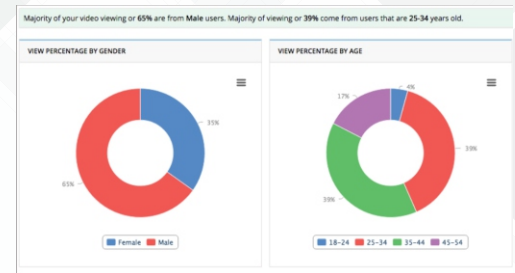
2 Total **tweets akun Twitter BPOM** s.d Triwulan I tahun 2018 sebanyak **258 kali**. top tweet materi menyambut Hari Gizi Nasional ke-58 dan penjelasan BPOM tentang Albothyl dan air minum kemasan. Top Media *Tweet* antara lain *Tweet* tentang Lempuyang, Penandaan unsur babi dan isu keamanan air kemasan yang ditinggal di dalam mobil. Akun resmi @KemenkeuRI menjadi *top follower* akun *Twitter* BPOM.



3 Total **followers instagram** s.d Triwulan I tahun 2018 mencapai **33.097 followers**. Pertumbuhan *followers* baru rata-rata **1.000 audience** per bulan. materi tentang Tips Belanja Pangan Aman menjadi konten yang paling banyak mendapat *likes*, yaitu **1.749 likes**. Untuk post konten materi dengan jumlah *comment* terbanyak adalah materi penjelasan tentang Albothyl sebanyak **257 comment**.



- 4 Channel **Youtube official** BPOM s.d Triwulan I tahun 2018 sudah dikunjungi oleh lebih dari **1.000 viewers**. Video yang diunggah sebanyak 13 video yang berhasil mendapat *likes* sebanyak 54 dan di-*share* sebanyak 37 kali. Total *subscribers* adalah 93 dengan penambahan *subscribers* baru pada periode ini sebanyak 47. Video yang paling sering ditonton dan paling disukai adalah video “Ada Apa Dengan Es Batu” dengan jumlah 113 *views* dan 17 *likes*. Video yang memperoleh respons baik dari *audience* ataupun mendapat *likes* kebanyakan berupa video mengenai tips atau informasi terkait BPOM.



Dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, telah dibentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan media komunikasi dua arah antara BPOM dan masyarakat. ULPK merupakan saluran penyampaian saran, pertanyaan, informasi, dan pengaduan masyarakat kepada BPOM.

Data **layanan informasi dan pengaduan** masyarakat melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia serta melalui *Contact Center* HaloBPOM1500533 sebanyak **9800 layanan** (9501 layanan informasi dan 299 layanan pengaduan).

- a **Profil profesi** masyarakat yang mengakses layanan informasi dan pengaduan masyarakat sebagian besar berasal dari **Pelaku Usaha** sebanyak **4260 (43,47%) layanan**.

PROFIL KONSUMEN LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT



MEDIA LAYANAN INFORMASI

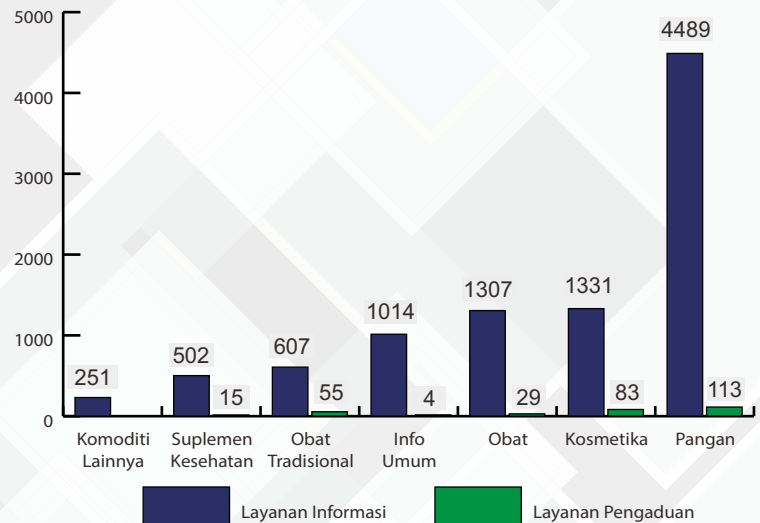


MEDIA LAYANAN PENGADUAN

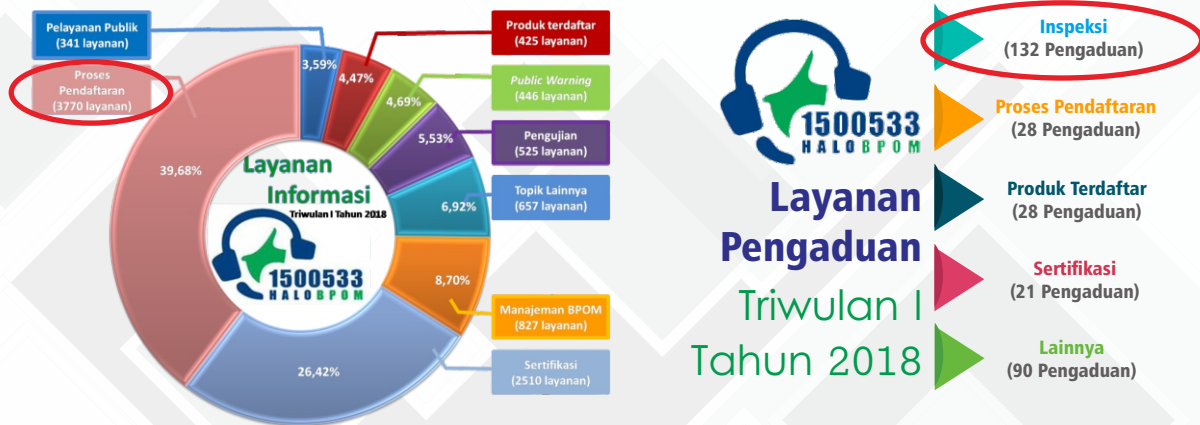


b Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui **telepon** sebanyak **4370 (45,99%)** layanan dan penyampaian pengaduan yaitu **datang langsung** sebanyak **102 (34,11%)** layanan.

c Komoditi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait **pangan** sebanyak **4489 (47,25%)** layanan informasi dan **113 (37,79%)** layanan Pengaduan.



- d** **Topik informasi yang paling banyak** ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait **proses pendaftaran** sebanyak **3770 (39,68%) layanan informasi** dan **topik pengaduan yang paling banyak** yaitu pengaduan **tentang inspeksi** sebanyak **132 (44,15%) layanan pengaduan**.



Tahun 2018 BPOM telah melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui media juga melakukan KIE secara langsung ke masyarakat, seperti BPOM 'Goes To Campus', Car Free Day (CFD), Pameran, kegiatan koordinasi lintas sektor dan lain sebagainya.

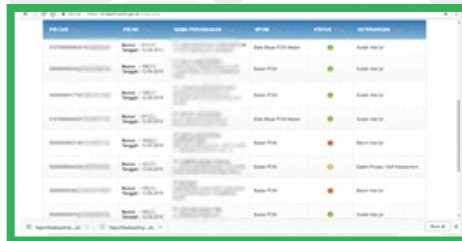




Pengembangan aplikasi e-BPOM



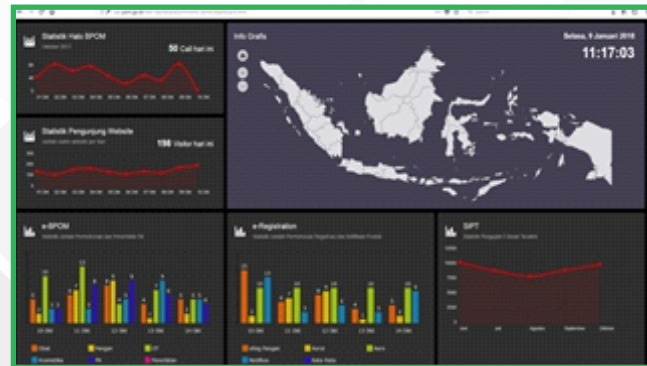
Updating SIPT Sesuai Prioritas Sampling 2018



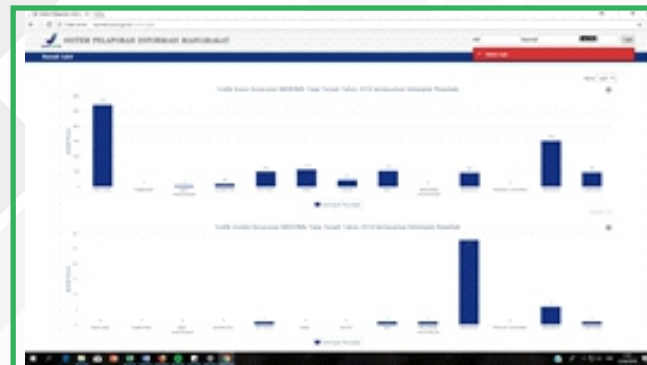
Implementasi SKI Border dan SKI post border pada aplikasi e-bpom



Tanda Tangan Elektronik (TTE) Aplikasi e-reg Pangan



Dashboard Command Center menayangkan 13 jenis data atau informasi



Dashboard Command Center menayangkan 13 jenis data atau informasi



Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Bersama dengan stakeholder lintas sektor antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM, BPOM ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. BPOM juga terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Permenkes Tahun 2018. Secara internal, sampai dengan triwulan I tahun 2018, BPOM telah menyelesaikan 2 Rancangan Peraturan Kepala BPOM, 83 Rancangan Keputusan Kepala BPOM dan 4 Rancangan MoU.



6 Judul RUU

1. RUU tentang Perlindungan Konsumen
2. RUU tentang Minuman Beralkohol
3. RUU tentang Ketenaganukliran
4. RUU tentang Narkotika
5. RUU tentang Pertembakauan
6. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan



7 Judul RPP

1. RPP tentang Pendaftaran Merk Internasional
2. RPP tentang Pelaksanaan urusan dan pemerintah konkuren
3. RPP tentang Jamininan Produk Halal
4. RPP tentang Revisi PP 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
5. RPP tentang Keamanan Pangan
6. RPP tentang Label dan Iklan Pangan'
7. RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada BPOM



7 Judul Rancangan PERMEN

1. Permenkes tentang perubahan Penggolongan Obat
2. Permenkes tentang perubahan penggolongan Psikotropika
3. Permenkes tentang Apotek
4. Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca
5. Permenkes tentang Pedagang Besar Farmasi
6. Permenkes tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Produk Tembakau
7. Permenkes tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma

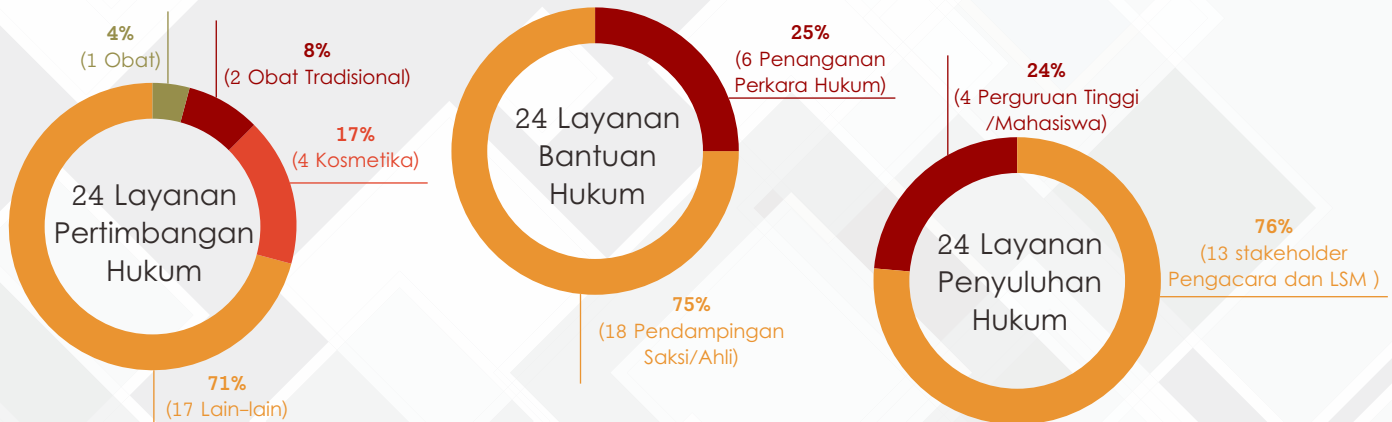


Layanan Bantuan Hukum (Legal Management)

Maraknya tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah tentu saja harus diantisipasi dengan penguatan peran pada bagian legal/hukum di setiap instansi pemerintahan. Satuan kerja yang membidangi urusan hukum ini dituntut untuk meningkatkan peran dan kemampuannya dalam menangani kritik dan koreksi masyarakat melalui pemberian bantuan hukum berupa pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan hukum kepada saksi/ahli, dan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018

jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sejumlah 65 layanan





Kerjasama Internasional

Kerjasama luar negeri BPOM tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan, namun juga untuk mendukung Agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sampai dengan triwulan I tahun 2018, BPOM telah melakukan 2 kerjasama Bilateral.

- a. 5 – 8 Maret 2018 : kunjungan kerja ke India yang bertujuan untuk melakukan benchmarking bagi pengembangan obat tradisional di Indonesia dengan mengikutsertakan pelaku usaha industri farmasi dan obat tradisional Indonesia untuk melakukan secara langsung pertemuan *Business to Business* dengan kalangan industri terkait di India guna mendukung kerja sama dagang yang menguntungkan kedua negara. Kunjungan tersebut telah dilakukan pertemuan dengan :
 1. *Central Drug Standard Control Organization (CDSCO)*,
 2. Minister of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa Rigpa, Homoeopathy (AYUSH) dan kunjungan ke RS. Maharishi Ayurveda Hospital
 3. Perwakilan Kadin India (*Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry – FICCI*) serta kunjungan ke sejumlah perusahaan farmasi papan atas di India.
- b. 11 – 14 Maret 2018 : Kepala BPOM selaku wakil Ketua Delegasi RI (Delri) menghadiri Pertemuan Sesi ke-61 *Commission on Narcotics Drugs (CND)* untuk mengikuti sesi Debat Umum (*General Debate*) dan *National statement* Indonesia yang memuat hal-hal antara lain:
 - Peran BPOM dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat dan pemberantasan obat ilegal melalui Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang diinisiasi oleh BPOM dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Oktober 2017.
 - Strategi pencegahan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor.
 - Perkuatan fungsi BPOM dalam penegakkan hukum kejahatan terkait obat dan makanan melalui pembentukan Kedeputan IV (Penindakan) dalam SOTK BPOM yang baru, sejalan dengan Keppres No 80 Tahun 2017 dan Perka BPOM No. 26 Tahun 2017.

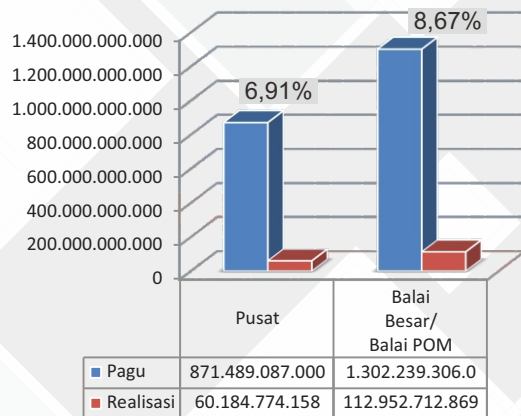
Di sela-sela pertemuan CND tersebut, BPOM juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan *Executive Director UNODC, Mr. Yury Fedotov*, yang sepakat untuk memperkuat dan kerja sama kedua lembaga melalui pembentukan suatu nota kesepahaman, khususnya dalam kerangka mendukung implementasi Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang diluncurkan oleh Bapak Presiden pada bulan Oktober 2017.

IX

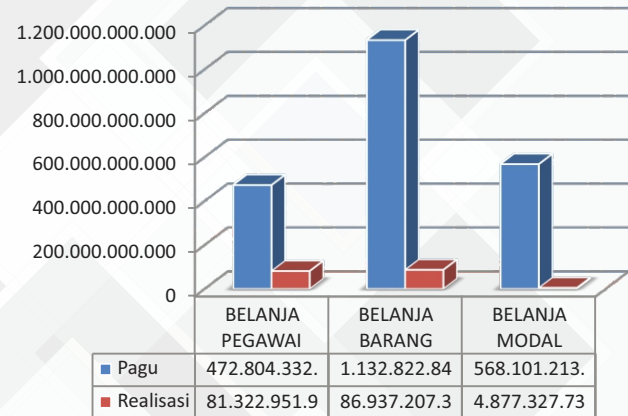
Pengelolaan Anggaran

Tahun 2018, BPOM mendapat anggaran sebesar **Rp2.173.728.393.000,-** untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk **9 Satker Pusat** dan **33 Balai Besar/Balai POM**.

Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2018 sebesar **Rp173.137.487.027,- (7,97%)** yang terdiri dari realisasi anggaran untuk **9 Satker Pusat Rp60.184.774.158,-** dan realisasi anggaran untuk seluruh **Balai Besar/Balai POM Rp112.952.712.869,-**.



Gambar 10. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan POM Pusat dan Balai s.d Triwulan I Tahun 2018



Gambar 11. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja s.d Triwulan I Tahun 2018



Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2018. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan I tahun 2018 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2015–2019 yaitu terwujudnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN

**CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2018**

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
I.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	378.332.217.000	39.563.895.429 (10,46%)	A	-	-
		Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK			WTP	-	-
		Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN			A	-	-
1.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman	25.743.700.000	1.022.142.085 (3,97%)	126	32	25,40
		Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti			17.500	4.958	28,33
		Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan			250	65	26,00
		Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun			200	59	29,50
1.2	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	7.225.900.000	428.358.714 (5,93%)	34	4	11,76
1.3	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	41.149.800.000	4.565.038.582 (11,09%)	15	4	26,67
		Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi			1	0	0
1.4	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	Persentase SDM BPOM memenuhi gfgStandar Kompetensi	204.322.699.000	29.023.851.194 (14,20%)	72	0	0
		Persentase SDM BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria minimal Baik			84		
		Persentase kualitas administrasi pimpinan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan			91		
		Persentase kualitas pengaturan acara dan kegiatan pimpinan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan			91		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan secara tepat waktu			100		
		Persentase layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu			88		
1.5	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	Jumlah laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	18.716.697.000	1.813.687.759 (9,69%)	39	8	20,51
		Persentase laporan keuangan BPOM yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan bebas dari kesalahan material			100	0	0
		Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP Unit Kerja			76	0	0
		Persentase hasil monitoring pencapaian Road Map RB			75	0	0
		Indeks kepuasan masyarakat			76	0	0
		Level Maturasi SPIP			3	3	100
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti BPOM			86	73,9	85,93
		Level kapabilitas APP (IACM)			3	3	100
1.6	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang up to date sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan	81.173.421.000	2.710.817.095 (3,34%)	730	0	0
		Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi E-Government bisnis proses BPOM			90	9,52	10,58
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	115.121.000.000	3.136.868.858 (2,72%)	100	9,52	9,52
2.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	2.541.000.000	149.297.500	5	7	140
2.2	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	112.580.000.000	2.987.571.358 (2,65%)	88	4	4,55
		Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik			100	9,52	9,52

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
III.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	1.661.708.186.000	130.436.722.739 (7,85%)	93,50	100	106,95
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat			83	91,50	110,24
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat			92	99,45	108,10
		Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat			82	90,48	110,34
		Persentase makanan yang memenuhi syarat			89,60	0	0
		Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya			13	0	0
		Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB			95	93	97,89
		Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan			230	211	91,47
		Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan			9	7,6	84,11
		Jumlah kerjasama yang diimplementasikan			17	4,5	26,47
		3.1			Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1.302.239.306.000
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63		2,97	4,71			
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25		6,03	24,12			
Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	318		91	28,62			
Jumlah layanan publik BB/BPOM	43.316		13.159	30,38			
Jumlah Komunitas yang diberdayakan	840		411	48,93			
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	297		26	8,75			
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	93		55,44	59,61			

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.2	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional yang memiliki sertifikat CPOTB	29.931.900.000	775.171.952 (2,59%)	95	93	97,89
		Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi			5.100	517	10,14
		Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi			10.150	481	4,74
		Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan			340	43	12,65
		Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan			790	25	3,16
		Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu			85	78,14	91,94
		Jumlah label kosmetik yang diawasi			10.150	1.198	11,80
		Jumlah iklan kosmetik yang diawasi			21.150	312	1,48
		Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan			230	211	91,74
		3.3			Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan	16.949.100.000
Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu	650		75	11,54			
Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan	78		100	128,21			
Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	9		7,57	84,08			

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.4	Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan, manfaat dan mutu bahan baku/formula dan peluang pasar obat asli indonesia	4.383.000.000	26.103.000 (0,60%)	6	0	0
		Jumlah UMKM obat tradisional yang diintervensi			40	0	0
3.5	Pengawasan Distribusi Obat	Persentase peningkatan pedagang besar farmasi yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik	18.566.990.000	464.261.106 (2,50%)	85	50	58,82
		Jumlah PBF yang diberikan bimbingan teknis/sosialisasi terkait CDOB			325	0	0
		Persentase pemenuhan time line tindak lanjut hasil pengawasan pedagang besar farmasi			87	60	68,97
		Persentase iklan dan penandaan obat beredar yang memenuhi ketentuan			100	99,23	106,13
		Jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca keamanan (farmakovigilance)			16	1	6,25
		Jumlah kajian farmakovigilans obat beredar			16	1	6,25
		Jumlah laporan ESO dari tenaga kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan dan industri farmasi yang ditindaklanjuti			800	197	24,63
3.6	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	10.769.100.000	184.476.300 (1,71%)	64.000	7.639	11,94
		Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor (NPP) farmasi yang tidak memenuhi ketentuan			78	0	0
		Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu			85	85,08	100,09

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.7	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	13.593.000.000	146.777.213 (1,08%)	170	0	0
		Persentase Kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan			90	0	0
		Persentase sarana bahan berbahaya yang diperiksa			56	0	0
3.8	Pengawasan Produksi Obat	Persentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu	13.547.000.000	613.787.348 (4,53%)	85	0	0
		Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya			13	0	0
3.9	Penilaian Pangan Olahan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	9.009.000.000	1.231.281.250 (13,67%)	88	20,70	23,53
3.10	Penilaian Obat	Persentase keputusan penilaian obat yang diterbitkan tepat waktu	9.009.000.000	887.098.819 (9,85%)	78	60,14	77,11
3.11	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase keputusan penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	13.096.000.000	944.036.939 (7,21%)	83	91	109,64
3.12	Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Jumlah standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang disusun	4.336.000.000	235.043.747 (5,42%)	40	7	17,50
		Jumlah keputusan dokumen uji obat klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tepat waktu			6	0	0
3.13	Penyusunan Standar Pangan	Jumlah standar pangan yang Disusun	8.176.900.000	879.841.868 (10,76%)	14	Progres 26,06%	Progres 26,06%
3.14	Penyusunan Standar Obat	Jumlah standar obat yang disusun	6.036.000.000	316.798.630 (5,25%)	10	Progres 6,44%	Progres 6,44%
3.15	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan	45.018.000.000	1.755.212.806 (3,90%)	100	0	0
		Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan			5	0	0
		Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan peraturan Kepala BPOM tentang IRTP			20	0	0

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.16	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM yang sesuai persyaratan Good Laboratory Practices	115.884.780.000	5.111.466.908 (4,41%)	80	0	0
		Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu			85	75,98	89,39
3.17	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan	Jumlah intervensi yang diberikan kepada BB/BPOM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	41.259.376.000	1.300.001.924 (3,15%)	78	10	12,82
		Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan berkas perkara (tahap 1)			5	0	0
		Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2)			3	0	0
3.18	Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan	Jumlah riset laboratoium dan kajsian yang dimanfaatkan	18.470.724.000	1.512.337.937 (8,19%)	72	0	0



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI



KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2018